



---

## EVALUASI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN MAKASAR JAKARTA TIMUR

Andri Wijaya | Abdul Rahman A, Ghani | Sri Yuliatwati

**How to cite :** Wijaya, Andri., Ghani, A.R.A., & Yuliatwati, Sri., 2023. EVALUASI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN MAKASAR JAKARTA TIMUR. Jurnal Penelitian dan Penilaian Pendidikan. 5(1). 1-13.

To link to this article <https://doi.org/10.22236/jppp.v5i1.11524>



©2023. The Author(s). This open access article is distributed under a [Creative Commons Attribution \(CC BY-SA\) 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Published Online on 23 June 2023



<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jppp>



View Crossmark data 



## EVALUASI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SEKOLAH DASAR KECAMATAN MAKASAR JAKARTA TIMUR

<sup>1</sup>Andri Wijaya, <sup>2</sup>Abdul Rahman A, Ghani <sup>3</sup>Sri Yuliawati

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Prof. DR. UHAMKA

Email : [andriwijaya@gmail.com](mailto:andriwijaya@gmail.com)  
[Abdulrahman.ag@uhamka.ac.id](mailto:Abdulrahman.ag@uhamka.ac.id)  
[Sri.Yuliawati@uhamka.ac.id](mailto:Sri.Yuliawati@uhamka.ac.id)

Received: January 19, 2023 Accepted: May 23, 2023 Published Online: June 23, 2023

### Abstrak

Secara umum tesis ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Evaluasi ini menggunakan pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis data dalam metode evaluasi ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dengan tahapan yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa: (1). Konteks dari pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam program KJP plus. (2) Input dari pelaksanaan program KJP Plus sudah sesuai dalam mendukung kesuksesan program KJP plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. (3) Pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah berjalan baik namun perlu ada perbaikan pada aspek pelaporan penggunaan dana KJP plus. (4) Ketercapaian pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur di masa pandemi covid-19 belum optimal terutama dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik khususnya dalam menunjang kebutuhan pendidikan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Program, KJP Plus, Sekolah Dasar.

### Abstract

*In general, this thesis aims to obtain information about the KJP Plus program at the Makassar District Elementary School, East Jakarta. This evaluation uses the CIPP model approach (Context, Input, Process, and Product). Data collection techniques through documentation studies, and questionnaires. The data analysis technique in this evaluation method uses a quantitative-descriptive approach with stages consisting of: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the evaluation concluded that: (1). The context of the implementation of the KJP Plus program at the Makassar District Elementary School, East Jakarta is in accordance with the applicable provisions in the KJP Plus program. (2) The input from the implementation of the KJP Plus program is appropriate in supporting the success of the KJP plus program at the Makassar District Elementary School, East Jakarta. (3) The implementation of the KJP Plus program at the Makassar District Elementary School, East Jakarta has been going well, but there needs to be improvements in the aspect of reporting the use of KJP plus funds. (4) The achievement of the implementation of the KJP Plus program at the Makassar District Elementary School, East Jakarta during the COVID-19 pandemic was not yet optimal, especially in meeting the needs of students, especially in supporting educational needs.*

**Keywords:** Elementary School, KJP Plus, Program Evaluation



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## **1. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya baik program KJP dan KJP Plus memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kemudahan bagi seluruh anak yang berada di DKI Jakarta untuk dapat menamatkan pendidikannya sampai dengan usia 21. Program KJP plus diutamakan untuk anak-anak yang berasal dari kalangan keluarga tidak mampu. Bantuan KJP Plus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, sehingga siswa-siswa yang kurang mampu bisa dibantu dan meringankan beban dari orang tua. Pada akhirnya program KJP Plus mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan.

Sebuah program yang dikeluarkan oleh Pemerintah tentunya memiliki kendala dalam mencapai keberhasilan dari tujuan yang direncanakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program KJP Plus adalah mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana yang ada dalam program KJP Plus. Pentingnya mekanisme pengelolaan dana KJP Plus yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program KJP Plus dengan efektif dan efisien. Bercermin pada pelaksanaan program KJP plus yang sudah berjalan, mutu pelayanan dan kualitas skema program terus membaik tiap tahunnya namun tetap menyisakan berbagai bentuk permasalahan.

Program KJP plus mulai dari tahun 2018 telah mengalami beberapa kali perubahan. Mekanisme pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar Plus pertama diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Pada tahun 2019 mekanisme pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar Plus berubah melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2019. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan layanan dan memperluas cakupan penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan. Pada tahun 2020 program KJP plus mengalami dua kali perubahan peraturan. Peraturan pertama tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020. Perubahan ini bertujuan untuk menjaga ketahanan Peserta Didik dalam kegiatan belajar selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta, perlu memperluas penggunaan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan Peserta Didik selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana. Perubahan terakhir di tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar Plus.

Pada masa pandemi covid 19, program KJP mengalami perubahan. Skema program KJP plus diubah dengan menggabung dana rutin dan dana berkala tiap bulannya, serta menghapus sementara kewajiban pencairan nontunai (Yuliani, 2020). Oleh karena itu, pada masa pandemi dana KJP Plus yang masuk dapat digunakan secara langsung tunai maupun nontunai. Sebelumnya dana KJP plus dalam pencairannya dibagi menjadi dua bagian yakni dana rutin dan dana berkala. Dana KJP Plus untuk peserta didik SD dana rutin dicairkan setiap bulan sebesar Rp. 135.000,- dapat diambil tunai sebesar Rp. 100.000,- sisa dana dibelanjakan secara nontunai. Dana berkala KJP plus untuk SD hanya bisa dicairkan setiap 6 bulan sekali di akhir semester dan dibelanjakan secara non tunai. Perubahan-perubahan terkait dengan peraturan ini tentunya dibutuhkan sosialisasi yang intensif. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana KJP plus.

Berdasarkan pengamatan dan observasi awal peneliti di lapangan. Peneliti menganalisis permasalahan KJP Plus terdiri dari dua. Permasalahan pertama yakni tentang mekanisme pengelolaan KJP plus. Mekanisme pengelolaan dimulai dari proses perekrutan penerima bantuan KJP Plus sampai dengan pengawasan yang dilakukan oleh instansi. Permasalahan yang kedua yaitu tentang pemanfaatan dana KJP plus.

Berikut diuraikan beberapa permasalahan yang termasuk ke dalam mekanisme pengelolaan yaitu:

- 1) Pengumpulan berkas persyaratan oleh orang tua terlambat, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam proses penginputan oleh operator sekolah ke dalam sistem KJP.
- 2) Masih sering kali terjadi kendala teknis seperti kesalahan input data dan lemahnya jaringan internet.
- 3) Terlambatnya pencairan dana KJP dan terpotongnya jumlah saldo yang ada pada KJP karena kesalahan sistem perbankan yang masih belum optimal.
- 4) Rendahnya pengawasan dan kesadaran pelaporan yang dilakukan oleh orang tua peserta didik penerima KJP

Permasalahan program KJP Plus yang termasuk ke dalam pemanfaatan dana KJP Plus yaitu:

- 1) Kurangnya sosialisasi penggunaan KJP yang tepat guna sehingga menimbulkan ketidakpahaman pihak sekolah maupun orang tua mengenai peraturan dalam kebijakan KJP
- 2) Penyalahgunaan fungsi dari KJP plus karena terdapat indikasi orang tua siswa penerima KJP Plus menggunakan dana KJP Plus bukan untuk kebutuhan pendidikan, melainkan kebutuhan lain dengan cara digadaikan oleh orang tuanya kepada rentenir.
- 3) Pelaksanaan Program KJP kurang memperhatikan sisi peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yaitu tidak adanya peningkatan dari segi akademik oleh peserta didik penerima KJP Plus.

Melihat pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan KJP Plus dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan dan berbagai masalah yang melingkupinya, menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Tujuannya untuk mengetahui secara riil pengelolaan dan pemanfaatan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur mulai dari konteks, input, proses dan produk.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam evaluasi merupakan metode penelitian evaluatif dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Evaluasi ini menggunakan pendekatan model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Komponen konteks yang di evaluasi adalah tujuan KJP Plus dan analisis kebutuhan program KJP Plus. Komponen input yang akan dievaluasi adalah kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung program. Komponen proses yang akan dievaluasi meliputi: rekrutmen, verifikasi data, penyaluran dana, dan pelaporan penggunaan dana. Komponen evaluasi *product* yang dievaluasi adalah ketercapaian hasil program dalam bentuk realisasi penggunaan dana KJP Plus dan pemanfaatan dana KJP Plus.

Teknik pengumpulan data melalui kuesioner dan studi dokumentasi. Kuesioner yang digunakan dalam evaluasi menggunakan dalam jenis kuesioner tertutup karena telah disediakan jawaban sehingga responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban dalam google form. Kuesioner ini ditujukan bagi kepala sekolah dan orang tua penerima program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar. Studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan melalui dokumen yang berhubungan dengan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

Kriteria evaluasi dalam penelitian ini akan menggunakan mengacu pada buku petunjuk teknis pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang termuat dalam beberapa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus dan perubahan pertama di dalam Nomor 15 Tahun 2019, Perubahan kedua di dalam Nomor 46 Tahun 2020 dan Perubahan ketiga di dalam Nomor 90 Tahun 2020. Data yang diperoleh dalam evaluasi ini bersifat kuantitatif (berupa kuesioner) sehingga perlu diolah dalam proses penarikan kesimpulan. Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu digunakan analisis data dari Miles dan Huberman dengan prosedur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan model interaktif (Putra, 2012).

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1) Hasil

#### Konteks pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur

**Tabel 1. Hasil Evaluasi Konteks Pelaksanaan Program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

Aspek yang Dievaluasi	Kriteria Keberhasilan	Hasil Evaluasi
1 Tujuan Program KJP Plus	Adanya kesesuaian tujuan program KJP plus di kecamatan Makasar Jakarta Timur dengan tujuan utama dari program KJP Plus	61,24% orang tua peserta didik dalam mengajukan permohonan bantuan program KJP plus memiliki tujuan untuk meringankan biaya personal atau kebutuhan pribadi.
2 Analisis Kebutuhan	Kondisi penerima KJP sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan	Kondisi keluarga penerima program KJP Plus rata-rata secara keseluruhan layak untuk menerima program KJP plus. Namun, masih terdapat beberapa penerima bantuan KJP Plus yang tidak tepat sasaran sehingga perlu diverifikasi kembali terkait dengan kondisi faktual di lapangan.

Evaluasi konteks pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur untuk mengkaji aspek tujuan dan analisis kebutuhan dari program KJP plus. Berdasarkan hasil evaluasi, tujuan orang tua peserta didik mengikuti program KJP plus telah sesuai dengan tujuan utama dari program KJP plus yaitu pemberian bantuan biaya personal atau kebutuhan pribadi dalam mendukung pendidikan peserta didik. Ditinjau dari analisis kebutuhan, profil kondisi keluarga penerima program KJP Plus secara keseluruhan layak untuk menerima program KJP plus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa konteks dari pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam program KJP plus.

**Input pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur.**

**Tabel 2. Hasil Evaluasi Input Pelaksanaan Program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

<b>Aspek yang Dievaluasi</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
1 Sumber Manusia	Daya Tersedianya SDM yang membantu pelaksanaan program KJP di Sekolah.	Kesiapan SDM dalam mendukung pelaksanaan program KJP plus sudah sangat baik. Satuan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Makasar secara keseluruhan memiliki operator yang bertugas khusus mengelola program KJP plus. Operator dalam menjalankan tugasnya melakukan penginputan data dibantu oleh para guru kelas dan komite sekolah
2 Sarana dan Prasarana Pendukung Program KJP Plus	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	Sarana dan prasarana pendukung program KJP plus sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dari ketersediaan laptop/komputer, kondisi laptop/komputer, kondisi jaringan internet, kemudahan mengakses web KJP Plus di Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

Evaluasi input pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur dievaluasi berdasarkan aspek kesiapan SDM dan dukungan sarana prasarana dalam program KJP plus. Kesiapan SDM dalam mendukung pelaksanaan program KJP plus sudah sangat baik. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KJP plus sangat mendukung. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa input dari pelaksanaan program KJP Plus sudah sesuai dalam mendukung kesuksesan program KJP plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

Proses pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

**Tabel 3. Hasil Evaluasi Proses Pelaksanaan Program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

<b>Aspek yang Dievaluasi</b>	<b>Kriteria Keberhasilan</b>	<b>Hasil Evaluasi</b>
1 Rekrutmen	Proses rekrutmen sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.	Secara keseluruhan proses rekrutmen penerima Program KJP Plus di Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah berjalan dengan baik. Proses rekrutmen yang masih belum terlaksana dengan baik adalah kepala satuan pendidikan mengumumkan daftar sementara calon penerima KJP Plus pada papan pengumuman satuan pendidikan yang mudah terbaca selama 6 (enam) hari kerja.

2	Verifikasi Data	Proses verifikasi data sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.	Proses verifikasi sudah berjalan dengan baik. Sekolah melakukan verifikasi data berdasarkan nama yang terdaftar sebagai calon penerima KJP Plus. Verifikasi dilakukan untuk mengecek keabsahan dari dokumen yang meliputi surat permohonan, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan surat ketaatan
3	Penyaluran Dana	Penyaluran dana data sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.	74,41% responden menjawab penyaluran dana KJP Plus rutin dilakukan setiap bulan. Ketepatan waktu penyaluran masih kurang, 50,59% menyatakan bahwa
Aspek yang Dievaluasi		Kriteria Keberhasilan	Hasil Evaluasi
			penyaluran dana KJP Plus masih sering mengalami keterlambatan
4	Pelaporan Penggunaan Dana KJP Plus	Adanya proses pelaporan penggunaan dana KJP plus	Pelaporan penggunaan dan KJP Plus masih belum optimal. Penerima KJP masih banyak yang tidak melaporkan penggunaan KJP plus ke sekolah. Penyerahan pelaporan seluruhnya belum dilaksanakan secara rutin. Sekolah meminta laporan jika ada indikasi penyalahgunaan dana KJP plus berdasarkan informasi yang diperoleh.

Hasil evaluasi pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur dievaluasi berdasarkan tahapan proses rekrutmen penerima KJP plus, proses verifikasi, penyaluran dana, dan pelaporan penggunaan dana KJP plus. Hasil evaluasi menyimpulkan secara keseluruhan tahapan proses pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah berjalan baik namun perlu ada perbaikan pada aspek pelaporan penggunaan dana KJP plus.

#### **Ketercapaian Hasil program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

**Tabel 4. Hasil Evaluasi Ketercapaian Hasil Pelaksanaan Program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

Aspek yang Dievaluasi	Kriteria Keberhasilan	Hasil Evaluasi
1	Realisasi Penggunaan dana KJP Plus	Realisasi penggunaan dana KJP plus sesuai dengan kebutuhan peserta didik
		Penggunaan dana tunai KJP plus, 66,57% penerima dana KJP Plus secara rutin langsung dihabiskan setiap pencairan. Penggunaan dana KJP Plus yang ditarik tunai pada saat pandemi covid-19 89,95% digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Penerima program KJP plus menggunakan dana KJP plus di Supermarket/Foodstore

2	Pemanfaatan dana KJP Plus sesuai dengan kebutuhan peserta didik	Pemanfaatan dana KJP plus sesuai dengan kebutuhan peserta didik	Penerima program KJP plus rutin memanfaatkan dana KJP Plus untuk keperluan pembelanjaan makanan, alat tulis dan perlengkapan sekolah, Buku dan penunjang pelajaran, Seragam dan kelengkapan.
---	---	---	--

---

Hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur dievaluasi berdasarkan penggunaan dan pemanfaatan dana KJP plus yang diterima. Penggunaan dana KJP Plus yang diterima secara rutin langsung dihabiskan dalam setiap pencairan.

Penggunaan dana KJP Plus yang ditarik tunai pada saat pandemi covid-19 sebagian besar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang dibelanjakan melalui Supermarket/Foodstore. Penerima program KJP plus rutin memanfaatkan dana KJP Plus untuk keperluan pembelanjaan makanan, alat tulis dan perlengkapan sekolah, Buku dan penunjang pelajaran, Seragam dan kelengkapan. Hasil evaluasi menyimpulkan secara keseluruhan ketercapaian pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur belum optimal terutama di masa pandemi covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik khususnya dalam menunjang kebutuhan pendidikan.

## 2) Pembahasan

### **Konteks pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

Dalam perjalanannya program KJP plus dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang telah mengalami tiga kali perubahan Peraturan Gubernur (Pergub). Pergub Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus merupakan pergub pertama yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar Plus. Dalam rangka meningkatkan layanan dan memperluas cakupan penerima bantuan biaya personal pendidikan pada tahun 2019 dilakukan perubahan yang tertuang dalam pergub nomor 15 Tahun 2019.

Pada masa pandemi covid-19 Pemerintah DKI Jakarta melakukan relaksasi terhadap program KJP plus. Tujuan dari relaksasi program ini adalah untuk menjaga ketahanan Peserta Didik dalam kegiatan belajar selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta. Dikeluarkannya pergub Nomor 46 Tahun 2020 sebagai perubahan kedua, bertujuan untuk memperluas penggunaan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan Peserta Didik selama masa tanggap darurat penanggulangan bencana. Perubahan ketiga di tahun 2020 melalui Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 bertujuan untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar Plus. Beberapa perubahan pergub tentang program KJP plus tentunya tidak menghilangkan konteks dari diluncurkannya program ini. Tujuan dari program KJP plus yang utama adalah pemberian bantuan biaya personal pendidikan agar masyarakat kategori tidak mampu mendapatkan hak pendidikan yang layak dan mencegah peserta didik putus sekolah. Pemberian bantuan biaya personal pendidikan ini tentunya harus benar-benar digunakan untuk kepentingan peserta didik dalam mendukung kegiatan pendidikannya.

Berdasarkan 676 responden orang tua penerima program KJP Plus, 61,24% orang tua peserta didik dalam mengajukan permohonan bantuan program KJP plus memiliki tujuan untuk meringankan biaya personal atau kebutuhan pribadi untuk pendidikan anaknya. Tujuan yang ingin dicapai melalui Program KJP Plus sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bertujuan untuk: (1) Mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (2) Meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata; (3) Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan; (4) Meningkatkan kualitas hasil pendidikan; (4) Menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk meningkatkan prestasi; (5) Mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di Satuan Pendidikan formal maupun non formal.

Program bantuan biaya personal melalui program KJP Plus memiliki peranan penting dalam kesuksesan dibidang pendidikan jika dimanfaatkan dengan baik. Hal ini sesuai penelitian Achmadi dan Shobahiya (2018) yang menjelaskan bahwa majunya pendidikan di negara Jepang, karena pendidikan wajib di Jepang gratis bagi semua siswa, bahkan bagi anak yang kurang mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk biaya makan siang, sekolah, piknik, kebutuhan belajar, perawatan kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Menurut Adha (2019), siswa di Finlandia mendapatkan makan siang secara gratis dengan makanan yang bergizi tinggi oleh pemerintah Finlandia, hal ini karena kecerdasan siswa dipercaya dipengaruhi asupan gizi yang baik. Seperti halnya di negara Jepang, bantuan biaya personal pendidikan diprioritaskan untuk anak yang kurang mampu. Oleh karena itu, dalam penentuan penerima bantuan program KJP plus harus benar-benar tepat sasaran. Hasil evaluasi menyebutkan bahwa ditinjau dari profil kondisi keluarga penerima program KJP Plus rata-rata secara keseluruhan layak untuk menerima program KJP plus. Namun, masih terdapat beberapa penerima bantuan KJP Plus yang tidak tepat sasaran sehingga perlu diverifikasi kembali terkait dengan kondisi faktual di lapangan.

Temuan peneliti diantaranya masih terdapat penerima program KJP plus yang pekerjaan kepala rumah tangga sebagai pegawai negeri dan TNI/Polri. Status kepemilikan penerima program KJP Plus memiliki rumah dinas. Jumlah watt yang menjadi sumber penerangan utama rumah tangga ada yang memiliki lebih dari 2200 watt. Aset yang dimiliki orang tua peserta didik yang memperoleh program KJP Plus terdapat kepemilikan kendaraan mobil AC, Telpon Rumah (bukan HP), dan usaha rumah kontrakan/kos. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020, Sasaran penerima KJP meliputi: Keluarga Tidak Mampu; Pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan Bus Kecil; Pekerja/Buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja; dan Anak Asuh.

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa konteks dari pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam program KJP plus. Agar program KJP plus semakin baik, dibutuhkan data calon penerima yang benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

### **Input pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 53 Satuan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Makasar, 46 sekolah dasar yang mengikuti program KJP plus. Sekolah yang tidak memiliki program KJP plus sebanyak 7 sekolah. Jumlah total peserta didik di sekolah dasar Kecamatan Makasar berjumlah 17391. Peserta didik yang menerima program KJP plus sebanyak 7043. Rata-rata tiap satuan pendidikan di Kecamatan Makasar yang menerima program KJP plus sebesar 40,50%. Agar suksesnya pelaksanaan program KJP Plus di Kecamatan Makasar tentunya dibutuhkan kesiapan SDM dan sarana prasarana yang mendukung.

Hasil evaluasi kesiapan SDM dalam mendukung pelaksanaan program KJP plus sudah sangat baik. Satuan pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Makasar secara keseluruhan memiliki operator yang bertugas khusus mengelola program KJP plus. Dukungan dari guru/wali kelas dalam pengumpulan berkas dan Komite sekolah membantu orang tua penerima program KJP plus yang kesulitan dalam menyiapkan dokumen persyaratan memudahkan proses pendataan dan verifikasi berkas.

Penyederhanaan dalam mekanisme pendataan ikut berperan dalam jalannya program KJP Plus. Mekanisme pendataan untuk program KJP Plus sekarang terdiri dari: (1) Dinas pendidikan mengumumkan data calon penerima KJP Plus sementara yang berasal dari Data terpadu Pemprov DKI Jakarta melalui sekolah, (2) calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah, (3) verifikasi kelengkapan berkas calon penerima (4) data final penerima ditetapkan. (<https://kjp.jakarta.go.id/kjp2>).

Hasil evaluasi sarana dan prasarana pendukung program KJP plus sudah sangat baik. Berdasarkan data yang diperoleh ketersediaan laptop/komputer, kondisi laptop/komputer, kondisi jaringan internet yang digunakan untuk program KJP Plus di Kecamatan Makasar Jakarta Timur sangat mendukung. Akses web yang digunakan dalam penginputan program KJP plus secara keseluruhan mudah diakses. Hal ini berarti dukungan terhadap input dari pelaksanaan program KJP Plus sudah sesuai dalam mendukung kesuksesan program KJP plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Hal ini sesuai hasil penelitian dari Noor dan Fajarina (2019), yang menyebutkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) antara lain dapat dilihat dari Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan KJP dan Komunikasi atau koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan KJP.

### **Proses pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

Tahapan pelaksanaan KJP Plus sekarang lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Pada tahun sebelumnya seluruh rangkaian proses pelaksanaan KJP dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah, mulai dari proses pendaftaran sampai dengan data final penerima. Pada tahun 2019 calon pelamar melakukan pendaftaran melalui sekolah, sekolah melakukan visitasi dan verifikasi ke calon penerima sebagai uji kelayakan, penetapan data calon penerima oleh sekolah, pelamar yang dianggap layak membuat surat keterangan tidak mampu (SKTM) melalui kelurahan, calon penerima melengkapi berkas melalui sekolah, sekolah melakukan verifikasi kelengkapan berkas, pengajuan data penerima oleh sekolah data final ditetapkan.

Pada tahun 2020, sekolah sudah menerima data calon penerima sementara yang diumumkan oleh Dinas Pendidikan. Sekolah hanya bertugas untuk mengumumkan calon penerima, memverifikasi berkas calon penerima, serta melakukan proses penginputan ke dalam sistem KJP plus. Secara keseluruhan proses rekrutmen dan verifikasi calon penerima Program KJP Plus di Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah berjalan dengan baik. Proses rekrutmen mengacu kepada data sementara calon penerima KJP Plus yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Proses verifikasi dilakukan untuk mengecek keabsahan dokumen surat permohonan, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan surat ketaatan.

Hasil evaluasi penyaluran dana KJP plus menunjukkan bahwa 74,41% responden menjawab penyaluran dana KJP Plus rutin dilakukan setiap bulan. Ketepatan waktu penyaluran masih kurang, 50,59% menyatakan bahwa penyaluran dana KJP Plus masih sering mengalami keterlambatan. Mekanisme pencairan dana KJP plus berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 980 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Kartu Jakarta Pintar Plus menjelaskan bahwa: (1) Pencairan KJP Plus untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan cara mendebet secara langsung ke rekenieng sekolah/madrasah. (2) Pencairan KJP plus untuk biaya rutin dapat ditarik secara tunai. (3) Pencairan KJP Plus untuk biaya berkala dapat dilakukan secara non tunai (4) Pencairan KJP plus selama status keadaan darurat bencana untuk biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan setiap bulan secara tunai dan non tunai.

Pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur yang belum berjalan optimal adalah pada aspek pelaporan. Penerima KJP masih banyak yang tidak melaporkan penggunaan KJP plus ke sekolah. Penerima program KJP plus melaporkan penggunaan dana KJP plus jika terdapat laporan ada indikasi penyalahgunaan dana KJP plus berdasarkan informasi yang diperoleh. Artinya dari segi pengawasan penggunaan dana KJP plus belum dilaksanakan dengan baik. Mekanisme pengawasan penggunaan KJP plus dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: (1) Peserta Didik penerima KJP Plus dan/atau orang tua/wali menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan KJP Plus (2) Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban memantau dan membina secara intensif Peserta Didik penerima KJP Plus dan orang tua/wali Peserta Didik.

Di dalam poin surat pernyataan ketaatan terdapat dua point penting terkait dengan penggunaan dan pelaporan. Bunyi di dalam surat pernyataan yaitu: Pertama, Bersedia membelanjakan KJP Plus untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu di sekolah. Kedua, Setiap bulan melaporkan penggunaan KJP Plus secara jujur, transparan dan bertanggungjawab.

Beberapa penelitian menjelaskan bahwa masih adanya penyalahgunaan dalam menggunakan dana KJP baik itu dari Orang Tua atau Wali Murid akibat lemahnya pengawasan penggunaan dana KJP plus (Susanti, 2019). Pihak sekolah perlu memperketat pengawasan dan bersikap tegas atas segala pelanggaran yang terjadi pada peserta didik penerima dana bantuan (Pertiwi & Yuningsih, 2016). Tindakan tegas dapat berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai bukti-bukti penyalahgunaan dan pelanggaran yang dilakukan.

### **Ketercapaian hasil program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur**

Pencarian dana KJP plus di masa pandemi dapat dilakukan secara tunai dan non tunai baik dana rutin maupun dana berkala. Pencairan dana rutin dan dana berkala dicairkan setiap bulan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, sebanyak 66,57% penerima KJP Plus secara rutin langsung menghabiskan dana KJP setiap pencairan. Sisanya hanya 33,43 yang menggunakan dana KJP plus sesuai kebutuhan. Mekanisme pencairan dana pada masa pandemi perlu ditinjau ulang, dengan dominan banyak penerima KJP yang langsung menghabiskan dana KJP terdapat indikasi penggunaan dana KJP tidak untuk kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 89,95% penggunaan dana KJP Plus yang ditarik tunai pada saat pandemi covid-19 lebih banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Penggunaan dana untuk kebutuhan peserta didik dalam mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh hanya 14,05%. Penerima program KJP plus banyak menggunakan dana KJP plus di Supermarket/Foodstore. Artinya terdapat indikasi penyalahgunaan dana KJP plus bukan untuk kebutuhan khusus peserta didik. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kartu Jakarta Pintar Plus, dijelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan peserta didik dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi: kebutuhan pangan; kebutuhan kesehatan; dan kebutuhan pendidikan.

Menurut Ratnasari dan Giyanto (2020), Program KJP Plus merupakan program inovasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan yang terus berlanjut karena faktor sumber daya (baik SDM maupun finansial/keuangan), adanya dukungan eksternal, dan dampak/efek yang ditimbulkan dari program KJP ini agar memudahkan pengawasan penggunaan dana salah satu cara yang dirasa paling efektif adalah pemenuhan kebutuhan peserta didik melalui koperasi sekolah. Hal ini sesuai pendapat Pertiwi dan Yuningsih (2016) yang menjelaskan bahwa pihak sekolah harus aktif mensosialisasikan tentang segala informasi KJP, membuat peraturan bahwa pembelian barang yang menggunakan dana KJP hanya bisa digunakan di koperasi sekolah agar mudah dalam mengontrol penggunaan dana. Sesuai dengan penamaannya yaitu program Kartu Jakarta Pintar Plus, sudah seharusnya pemanfaatan program ini untuk mendukung kemajuan pendidikan para peserta didik. Berdasarkan hasil evaluasi, Penerima program KJP plus rutin memanfaatkan dana KJP Plus untuk keperluan pembelanjaan makanan, alat tulis dan perlengkapan sekolah, Buku dan penunjang pelajaran, Seragam dan kelengkapan. Jika orang tua penerima KJP plus tidak memanfaatkan dana KJP untuk kebutuhan dalam mendukung pendidikan anak namun pemanfaatannya untuk kepentingan keluarga maka ini merupakan sebuah bentuk eksploitasi pada hak anak dalam mencapai prestasi di bidang pendidikan.

Beberapa hasil penelitian Shunhaji, Sarnoto, dan Taufikurrahman (2019), menyebutkan bahwa pelaksanaan Program KJP plus kurang memperhatikan sisi peningkatana kualitas Pendidikan hal ini terlihat dari tidak adanya peningkatan akademik peserta didik penerima KJPplus. Hasil penelitian Handayani, Abdullah, Sari, dan Nagul (2020), menunjukan bahwa penggunaan KJP Plus kurang tepat sasaran, masih banyak penerima KJP Plus merupakan keluarga yang berkecukupan dari segi penghasilan. Untuk itu perlu adanya perumusan kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui KJP Plus.

#### 4. KESIMPULAN

Konteks dari pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam program KJP plus. Tujuan orang tua peserta didik mengikuti program KJP plus telah sesuai dengan tujuan utama dari program KJP plus yaitu pemberian bantuan biaya personal atau kebutuhan pribadi dalam mendukung pendidikan peserta didik. Profil kondisi keluarga penerima program KJP Plus secara keseluruhan layak untuk menerima program KJP plus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Input dari pelaksanaan program KJP Plus sudah sesuai dalam mendukung kesuksesan program KJP plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Kesiapan SDM dan sarana prasarana sudah sangat baik dalam pelaksanaan program KJP plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

Pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur sudah berjalan baik namun perlu ada perbaikan pada aspek pelaporan penggunaan dana KJP plus. Ketercapaian pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur di masa pandemi covid-19 belum optimal terutama dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik khususnya dalam menunjang kebutuhan pendidikan.

Perbaikan pada aspek pelaporan penggunaan dana KJP plus dalam pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur perlu segera dicarikan solusinya. Setiap bantuan yang menggunakan anggaran pemerintah, maka penerima bantuan wajib menggunakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika pelaporan dan pengawasan penggunaan dana lemah, maka potensi penyalahgunaan dana bantuan KJP Plus masih akan tetap ada.

Akibat adanya relaksasi terhadap pencairan dana KJP plus maka ketercapaian pelaksanaan program KJP Plus di Sekolah Dasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur belum optimal terutama di masa pandemi covid-19. Dampaknya dana KJP plus banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga bukan pemenuhan kebutuhan peserta didik khususnya dalam menunjang kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, penggunaan dana KJP Plus diharapkan lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik dalam mendukung kebutuhan pendidikan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, & Shobahiya, M. (2018). Sistem Pendidikan (Studi Komparasi antara Indonesia dan Jepang). *Ishraqi*, IV(1), 73–91.
- Adha, M. A. (2019). Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. *TADBIR : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2).
- Handayani, T., Abdullah, K., Sari, Y., & Nagul, V. (2020). Efektifitas Penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus Di Sekolah Dasar Negeri Kota Administrasi Jakarta Timur. *In Prosiding Seminar Dan Diskusi Pendidikan Dasar*. <https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/> diakses hari Rabu 19 Juni 2021 Pukul 10.45. (n.d.).
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 980 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Kartu Jakarta Pintar Plus.*
- Noor, D. V., & Fajarina. (2019). Monitoring dan Evaluasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di Wilayah Jakarta Pusat. *Jurnal Abdimas*, 5(4), 222–228.

Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018. Tentang *Kartu Jakarta Pintar Plus*.

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 Tentang *Kartu Jakarta Pintar Plus*.

Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2020 tentang *Kartu Jakarta Pintar Plus*.

Pertiwi, Y. M., & Yuningsih, T. (2016). Pentingnya faktor komunikasi dalam Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Administrasi Jakarta Timur. *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 2(1). Putra, N. (2012). *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Indeks.

Ratnasari, Y., & Giyanto, B. (2020). Determinan yang Mempengaruhi Keberlanjutan Program Inovasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 2(1).

Shunhaji, A., Sarnoto, A. Z., & Taufikurrahman, I. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di MI Tarbiyatul Islamiyah Jakarta Selatan. *Journal of Islamic Education*, 1(2).

Susanti, D. E. (2019). Pemberian KJP (Kartu Jakarta Pintar) Studi Kasus Pada SMP 120 Jakarta. *Jurnal AKRAB JUARA*, 4(3).

Yuliani, P. A. (2020). Pandemi Covid-19, Pemprov DKI Ubah Skema Pencairan Dana. *Media Indonesia*. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/megapolitan/313226/pandemi-covid-19-pemprov-dki-ubah-skema-pencairan-dana-kjp>